

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tahun 2017 merupakan tahun kedua dari rangkaian pembangunan Kabupaten Wonosobo yang berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 dengan visi " Terwujudnya Wonosobo Bersatu untuk Maju, Mandiri, dan Sejahtera untuk Semua". Dari visi tersebut terlihat secara jelas arah tujuan secara umum yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yaitu terciptanya masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera di segala bidang yang akan diraih melalui pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk menjabarkan visi tersebut dalam kerangka operasional, maka diuraikan dalam pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan, melalui pelaksanaan program kerja pemerintah daerah selama lima tahun. Adapun hubungan misi, sasaran, arah kebijakan dan tujuan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 :

Tabel 4.1

Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat	Membangun semangat persatuan, kesatuan dan toleransi sebagai modal pembangunan	Meningkatnya kesadaran/pemahaman tentang hak dan kewajiban
			terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum berbasis prakarsa bersama
			Meningkatnya perlindungan masyarakat
			Mantapnya konsolidasi demokrasi
2	Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan untuk perbaikan pelayanan publik	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi
			Terwujudnya birokrasi dan aparatur yang adaptif, responsif, peduli dan melayani
3	Meningkatkan kemandirian daerah	Meningkatkan produktivitas, kemampuan pengelolaan sumber daya dan membangun budaya berdikari	Meningkatnya produksi dan produktivitas daerah
			Meningkatnya kemampuan pengelolaan sumber daya dan potensi

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
			Terwujudnya masyarakat bermartabat, berbudaya dan berdikari
			Meningkatnya indeks daya saing daerah
4	Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataannya	Mendorong pertumbuhan yang berkeadilan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya kesetaraan pertumbuhan ekonomi wilayah
			Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha
			Meningkatnya kesejahteraan ekonomi
			Terpenuhinya layanan dan hak dasar untuk kesejahteraan masyarakat
5	Harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan sebagai prinsip pembangunan daerah	Terwujudnya prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Terwujudnya pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan berkesinambungan
			Dipraktekannya prinsip perencanaan pembangunan yg berkelanjutan
			Berkembangnya kapasitas adaptasi perubahan iklim dan terjaganya keanekaragaman hayati
			Berkembangnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan
			Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi

Tabel 4.2
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Membangun semangat persatuan, kesatuan dan toleransi sebagai modal pembangunan	1.a. Meningkatnya kesadaran/pemahaman tentang hak dan kewajiban	Mengintensifkan pendidikan karakter, budi pekerti, hak asasi dan kebangsaan	Memperluas pendidikan kewarganegaraan pada semua elemen masyarakat
			Menguatkan perangkat kebijakan pelaksanaan Wonosobo Ramah HAM	Mengakselerasi diseminasi isu tentang Program Wonosobo Ramah HAM
			Meningkatkan indeks toleransi	Mendorong toleransi beragama dan antar umat beragama

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		1.b. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum berbasis prakarsa bersama		Mendorong penghormatan masyarakat terhadap keberagaman
			Memperkuat pranata sosial berbasis warga dan komunitas	Memperkuat pranata sosial untuk mendorong keeratan (kohesi) sosial
			Melakukan kewaspadaan dan deteksi dini berbasis masyarakat	Meningkatkan peran kelembagaan dan jejaring sosial
		1.c. Meningkatnya perlindungan masyarakat	Mendorong tumbuhnya modal sosial	Menumbuhkan aksi kolektif berbasis masyarakat dan lembaga sosial
			Melakukan transformasi kebijakan fungsi penegakan Perda melalui optimalisasi fungsi Satpol PP	Meningkatkan pemenuhan rasio dan kapasitas/kompetensi Satpol PP
				Mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan secara proaktif oleh Satpol PP
				Mengembangkan metode penegakan Perda secara lebih partisipatif
			Mengembangkan sistem pendukung untuk penanganan gangguan keamanan	Membangun sistem respon cepat untuk penanganan gangguan keamanan
				Menjalin kemitraan antar aparat trantibum linmas pada semua level
			Menumbuhkan ketangguhan masyarakat yang dicirikan dengan sikap tanggap, kritis dan konstruktif	Menumbuhkan masyarakat yang berbudaya kritis dan peduli melalui penegakan revolusi mental
				Mengembangkan nilai kearifan lokal yang mendukung semangat gotong-royong dan kebersamaan
		1.d. Mantapnya konsolidasi demokrasi	Mendorong terwujudnya demokrasi dan partisipasi	Mengembangkan pendidikan politik untuk masyarakat
				Menguatkan iklim demokrasi, keterbukaan dan partisipatif
2	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan untuk perbaikan pelayanan publik	4.a. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan sesuai semangat Reformasi Birokrasi	4.a.1. Merevitalisasi fungsi perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Menguatkan kapasitas perencanaan daerah
				Membangun data basis terintegrasi sebagai sistem penopang perencanaan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Membangun sistem perencanaan yang partisipatif dan komprehensif
				Menciptakan ruang partisipasi masyarakat
			4.a.2. Membangun birokrasi modern sesuai Kebijakan ASN	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi, penyelenggaraan pemerintahan
				Melakukan penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah daerah untuk mewujudkan manajemen birokrasi modern
				Membangun dan mengembangkan sistem prosedur dan tata kerja birokrasi sesuai ASN
				optimalisasi/peningkatan kinerja Pemerintahan daerah
				Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
				Mendorong implementasi kebijakan alokasi keuangan sesuai prioritas
				Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian
				Penguatan budaya integritas, budaya kinerja
			4.a.3. Mengembangkan sistem penopang pemerintahan dan birokrasi	Mengembangkan E-Government untuk mendukung praktek pemerintahan yang berorientasi layanan
				Mengembangkan sistem penopang pemerintahan dan birokrasi berbasis TIK
				Mengembangkan kestatistikan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3		4.b. Terwujudnya birokrasi dan aparatur yang adaptif, responsif, peduli dan melayani	Mengembangkan budaya kepemimpinan yang memberikan keteladanan	mendayagunakan persandian untuk meningkatkan aspek keamanan sistem informasi
				Mengembangkan sistem pengelolaan kearsipan untuk menunjang akuntabilitas
				Mengembangkan kemampuan manajerial kepemimpinan berintegritas
				Mendorong keteladanan untuk membangun kultur dan etika birokrasi yang egaliter dan berintegritas
				Meningkatkan kualitas dan integritas layanan publik
				Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan
		4.c. Terwujudnya keselarasan hubungan pemerintahan	Meningkatkan harmonisasi dan kemitraan penyelenggaraan pemerintahan	Mengembangkan kemitraan hubungan dengan instansi vertikal
				Memberikan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan
				Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum dan kebijakan pemerintahan
		Meningkatkan produktivitas, kemampuan pengelolaan sumber daya dan membangun budaya berdikari	Meningkatnya produksi dan produktivitas daerah	Peningkatan Kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia
	Peningkatan kualitas pendidikan vokasi			
	Menciptakan keterpaduan dan keselarasan antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha.			
	Membangun etos kerja yang produktif			Merangsang produktifitas dengan pemberian insentif
				Menumbuhkan semangat wirausaha
	Mewujudkan iklim usaha yang kondusif untuk pengembangan ekonomi dan merangsang investasi			Mengembangkan sistem penopang untuk kemudahan informasi bisnis dan investasi
				Melakukan deregulasi perizinan dan insentif investasi
		Menjamin kepastian hukum untuk perizinan investasi		

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				mendorong kemudahan akses permodalan
				Fasilitasi kebijakan pengembangan ekonomi lokal
			Menjaga ketersediaan input produksi dan komoditas pokok	Memperluas jaringan penyediaan sarpras produksi
				Menjaga ketersediaan dan stabilitas harga barang produksi dan komoditas pokok
				Menerapkan insentif untuk penyediaan input produksi
				Menjamin kemudahan akses terhadap input produksi dan barang pokok
				Menerapkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi
			Meningkatkan kualitas produk daerah	Memberikan fasilitasi untuk sertifikasi standar mutu produk
				Melakukan pembinaan dan pengawasan mutu produk
		Meningkatnya kemampuan pengelolaan sumber daya dan potensi	Mendorong pengembangan potensi lokal	Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan (asli) daerah (untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah)
				Mengoptimalkan kinerja badan usaha milik daerah
				Menerapkan one district one product (ODOP) dan one village one product (OVOP) sebagai basis pengembangan potensi lokal
				Mengembangkan BUMDes sebagai salah satu pelaku utama perekonomian masyarakat
				Optimalisasi kelembagaan koperasi yang bersinergi dengan BUMDes
				Optimalisasi pemanfaatan aset desa untuk pengembangan ekonomi pedesaan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				mendorong pemetaan potensi lokal secara partisipatif
				meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya ekonomi
				Mengoptimalkan nilai tambah produk dan proses produksi
			Menguatkan kapasitas fiskal tingkat desa	Optimalisasi dana transfer desa untuk menopang pengembangan ekonomi pedesaan
				Mengarahkan APBDes sebagai salah satu instrumen pengembangan ekonomi perdesaan berdasarkan prioritas
			Mendorong kedaulatan pangan	Mendorong penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
				Menetapkan kebijakan harga dasar bahan pangan yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi
				Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan
				Penyediaan dan penyaluran pangan sesuai kebutuhan daerah
				Meningkatkan pengawasan keamanan pangan
				Mengintensifkan penanganan kerawanan pangan
			Mengembangkan kerjasama daerah untuk mendayagunakan potensi	Mengembangkan kerjasama daerah dengan berbagai pihak untuk pengembangan ekonomi dan kesejahteraan
		Terwujudnya masyarakat bermartabat, berbudaya dan berdikari	Membangun masyarakat berdikari, berprestasi dan menjunjung kebudayaan	Mengaktualkan nilai kearifan lokal untuk kemajuan
				Mendayagunakan kekayaan budaya untuk kesejahteraan
				Menumbuhkan budaya berprestasi masyarakat

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Membangun masyarakat kreatif, inovatif, dan berorientasi kemajuan	Mendorong berkembangnya pajanan informasi dan minat baca masyarakat
				Meningkatkan daya juang dan kecakapan hidup (<i>life skill</i>)
				Menumbuhkan kebanggaan terhadap produk dan identitas Wonosobo
		Meningkatnya daya saing daerah	Mendorong iklim kreatif dan kewirausahaan bagi pelaku ekonomi	mengembangkan industri kreatif untuk menopang pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan
				Memberikan insentif bagi pengusaha kecil menengah
				Mengembangkan inisiatif ekonomi berbasis komunitas
				Meningkatkan nilai tambah komoditas
				Memberikan ruang untuk kreasi dan inovasi
				Mengarahkan litbang daerah sebagai salah satu penopang ekonomi
				Meningkatkan kapasitas/kualitas pengusaha kecil
				Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi
	Mendorong pertumbuhan yang berkeadilan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	Terwujudnya kesetaraan pertumbuhan ekonomi wilayah	Melakukan pemerataan pembangunan wilayah	Menetapkan pagu wilayah kecamatan sebagai salah satu instrumen dalam penetapan anggaran
				Mengakselerasi pembangunan wilayah melalui penyediaan infrastruktur dasar berkualitas
				implementasi kebijakan afirmasi (pemihakan) kawasan kurang berkembang
				Mendorong sinergi pembangunan infrastruktur bersumber dana desa
				Kebijakan pemerataan penduduk sesuai dengan pertumbuhan wilayah

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Membangun sistem transportasi	Peningkatan aksesibilitas wilayah guna mengakselerasi pembangunan
				Menjamin keterangkutan orang dan barang
				Mengembangkan sistem transportasi yang efisien tataran transportasi lokal (tatalok)
				Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang layak
			Mengembangkan kawasan perdesaan sebagai salah satu basis pertumbuhan ekonomi	Menciptakan desa pusat pertumbuhan
				Meningkatkan keterkaitan antar kawasan dalam pembangunan wilayah
		Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha	Menciptakan peluang lapangan pekerjaan baru	Menumbuhkan sektor usaha baru
				Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan korporat
				Mendorong investasi yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
				Mendorong Pengembangan Desa Wisata
				Mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif dan wirausaha muda
				Mendorong tumbuhnya usaha mikro
				Menciptakan peluang kerja dan kesempatan berusaha untuk warga berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas
				Meningkatkan penempatan tenaga kerja
		Meningkatnya kesejahteraan ekonomi	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Meningkatkan akses permodalan termasuk berbagai skema kredit untuk usaha mikro dan rumah tangga
				Mengembangkan koperasi sebagai fundamen ekonomi kerakyatan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Mengembangkan usaha ekonomi yg berorientasi ekspor
				Mendorong upaya distribusi pendapatan
				Transformasi kebijakan keluarga berencana untuk peningkatan kesejahteraan keluarga
			Memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat	Mereformulasi upaya pemberdayaan masyarakat berbasis kekuatan dan potensi
				Mengembangkan lembaga ekonomi produktif desa
		Terpenuhinya layanan dan hak dasar untuk kesejahteraan masyarakat	Mempercepat pemenuhan layanan dasar pendidikan bagi masyarakat	Meningkatkan dan pemerataan akses layanan pendidikan formal dan non formal
				Meningkatkan standar layanan pendidikan
				Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan sekolah inklusi
				Meningkatkan kualitas keluaran dan relevansi dengan kebutuhan bursa kerja
				Meningkatkan manajemen tata kelola pendidikan
			Melaksanakan pemenuhan layanan dasar kesehatan bagi masarakat	Meningkatkan dan pemerataan akses dan standar layanan kesehatan dasar dan rujukan
				Meningkatkan mutu, pemerataan, dan ketersediaan tenaga kesehatan
				Meningkatkan mutu dan cakupan jaminan kesehatan
				Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kewaspadaan deteksi dini gangguan kesehatan
				Meningkatkan kualitas layanan KB dan kesehatan reproduksi

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Melaksanakan pemenuhan layanan dasar sosial bagi masyarakat	Menyelenggarakan perlindungan sosial secara komprehensif
				Memperkuat peran kelembagaan sosial
				Membangun sistem penopang bagi penyelenggaraan layanan untuk PMKS
			Pemenuhan Perumahan dan pemukiman bagi masyarakat	Menurunkan angka kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat (backlog)
				Mempercepat penanganan kawasan pemukiman kumuh
				Memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas sanitasi di kawasan pemukiman
				Mendorong efisiensi pemanfaatan ruang bagi kawasan pemukiman
			Pemenuhan layanan dasar Pekerjaan Umum bagi masyarakat	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur
				Memperbesar aksesibilitas wilayah
		Terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih berkeadilan	Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Meningkatkan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja
				Peningkatan standar upah yang layak bagi tenaga kerja
				Peningkatan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
				Mendorong kemitraan antara Pemda, pengusaha dan tenaga kerja
				Meningkatkan kesetaraan keadilan gender dan perlindungan anak
		Meningkatkan kapasitas perempuan		

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Menjamin perlindungan anak	Peningkatan akses dan kualitas hidup, perlindungan, pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
				Mengembangkan model pendidikan ramah anak
			Memperkuat kepastian hukum terhadap hak - hak tanah	meningkatkan kepastian hukum dan tertib administrasi bagi properti (tanah milik masyarakat)
				Menyeimbangkan antara hak atas tanah dan hak membangun di atas tanah
				Penataan administrasi pertanahan terhadap lahan-lahan aset negara sebagai salah satu sumber daya pembangunan
				Memfasilitasi penyelesaian sengketa atas tanah
				Menjamin ganti rugi yang layak dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum
			Mengembangkan layanan informasi dan komunikasi publik	Mengembangkan layanan informasi publik untuk peningkatan partisipasi masyarakat
				Mendayagunakan kemitraan untuk pengelolaan informasi publik
			Menjamin pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan adminduk capil	Memperluas akses dan prosedur pelayanan adminduk dan capil
				Mengembangkan alternatif sistem layanan adminduk dan capil sesuai kebutuhan
				mendayagunakan data basis kependudukan untuk mendukung layanan publik
5	Terwujudnya prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan	Terwujudnya pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan berkesinambungan	Mendorong pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam secara rasional berdasarkan prinsip berkelanjutan	Menerapkan kebijakan tata ruang secara berkelanjutan, partisipatif dan berkeadilan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam			Mewujudkan Wonosobo sebagai daerah pariwisata/budaya yang didukung pertanian berkelanjutan (<i>agro-eco-culture-tourism</i>)
				Menerapkan kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung kawasan
				Mendorong inisiasi dan kreasi berbasis komunitas untuk pengelolaan LH dan SDA secara berkelanjutan
				Menjaga kualitas lingkungan hidup
			Pengelolaan persampahan melingkupi pengumpulan pengangkutan dan pengelolaan akhir	Perluasan cakupan layanan persampahan
				Pengurangan timbulan sampah
				Pengelolaan sampah terpadu
				Pemilahan sampah dari sumbernya
				Sarana dan prasana pengelolaan sampah
				Kemitraan pengelolaan sampah
				Peningkatan pemanfaatan sampah
			Menerapkan ekonomi hijau (<i>green economy</i>) sebagai salah satu prinsip pembangunan	Mendorong praktek seperti pertanian organik
				Mendorong konsep PDRB hijau / ekonomi hijau
			Mendayagunakan sumber daya alam untuk kepentingan ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial dan budaya secara berkelanjutan	Membangun/menciptakan inisiatif Dieng Geopark, Science Park, Techno Park
			Mendorong implementasi 8 atribut kota hijau	Implementasi prinsip Kota hijau dalam kebijakan pembangunan
		Dipraktekannya prinsip perencanaan pembangunan yg berkelanjutan	adopsi dan pengarusutamaan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam <i>assessment</i> program	KLHS sebagai alat kontrol assesment program
			Menerapkan perencanaan dan kebijakan tata ruang yang partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan	Mendorong partisipasi publik dalam perencanaan tata ruang

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Berkembangnya kapasitas adaptasi perubahan iklim dan terjaganya keanekaragaman hayati	Transformasi perspektif perubahan iklim dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan	Mengembangkan upaya mitigasi perubahan iklim
				Memperluas upaya adaptasi perubahan iklim
			Transformasi pelestarian keanekaragaman hayati sebagai salah satu prinsip dasar pembangunan	Memperluas upaya pelestarian keanekaragaman hayati
				Upaya pemanfaatan dan pengelolaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan
			Melakukan transformasi isu perubahan iklim secara sederhana sehingga dipahami oleh masyarakat	Inisiasi terbentuknya kearifan lokal tentang perlindungan flora dan fauna
				Mendorong tumbuhnya komunitas -komunitas peduli lingkungan
		Berkembangnya pemanfaatan energi dan energi baru/terbarukan	Mendorong kemandirian energi	Mengembangkan dan pemanfaatan energi baru terbarukan
				Penyusunan perencanaan pemanfaatan dan penyediaan energi
			Meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi	Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan energi
				Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif
		Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi	Meningkatkan kemampuan adaptasi dan upaya mitigasi bencana	Mendorong prinsip hemat energi dalam kehidupan
				Meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat
				Meningkatkan upaya mitigasi bencana

B. Prioritas Pembangunan 2017

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antar kebijakan pusat dan daerah.

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. **Visi tersebut adalah "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"**, yang dilakukan melalui **7 misi pembangunan** yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut **"Nawa Cita"**, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk **melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman** kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun **tata kelola pemerintahan** yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. **Membangun Indonesia dari pinggiran** dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam **melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum** yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan **kualitas hidup manusia dan masyarakat** Indonesia;
6. Meningkatkan **produktivitas rakyat dan daya saing** di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan **sektor-sektor strategis** ekonomi domestik;
8. Melakukan **revolusi karakter bangsa**;
9. Memperteguh **kebhinekaan** dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

1. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;

3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur.

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2019, antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 8%;
2. Laju inflasi sebesar 3,5%
3. PDB per kapita sebesar Rp. 72.217 ribu
4. Indeks Gini sebesar 0,36
5. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 – 8,0%
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,3
7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0-5,0%

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari RPJMN Tahun 2015-2019. dilaksanakan dalam rangka **Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah**".

2. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2017

Tahun 2017 yang merupakan tahun keempat RPJMD, menjadi tahun yang strategis untuk melihat ketercapaian pembangunan daerah jangka menengah Jawa Tengah. Berdasarkan permasalahan dan isu strategis, serta kebijakan dan upaya pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 ditujukan untuk **"Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Energi Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemandirian Wilayah"**. Guna mendorong pencapaian tujuan pembangunan tahun 2017 tersebut, ditetapkan arah kebijakan pembangunan yang menjadi **prioritas pembangunan tahun 2017**, meliputi :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan.
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin.
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan.
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra /klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 diarahkan terutama untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan dan energi serta percepatan pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Prioritas pembangunan daerah tahun 2017 lebih ditujukan pada upaya-upaya antara lain:

- a. peningkatan produktivitas kedelai dan garam;
- b. program pembangunan 1000 embung melalui peningkatan kuantitas dan kualitas embung/tampungan air;
- c. peningkatan jaringan irigasi;
- d. pengembangan energi baru terbarukan;
- e. pemberian bantuan siswa miskin untuk pendidikan menengah dan khusus;
- f. pembiayaan kesehatan masyarakat miskin non kuota APBN;
- g. peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
- h. penanganan infrastruktur pendukung pariwisata dan pengurangan kemiskinan;
- i. penanganan lahan kritis.

C. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

Masih tingginya angka kemiskinan daerah menjadi perhatian besar Pemerintah Daerah dalam proses pembangunan daerah. Data tahun 2013, tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo masih 22,08 persen yang merupakan angka tertinggi se-Provinsi Jawa Tengah. Dengan target angka kemiskinan 18 persen pada tahun 2016, maka dengan kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus mengakselerasi program pembangunan yang pro dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, perlu dukungan bersama seluruh stakeholder dan masyarakat untuk saling bekerjasama, bahu membahu dalam upaya peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Wonosobo.

Maka untuk tahun 2017 ditetapkanlah Tema Pembangunan Kabupaten Wonosobo yaitu: **"Pemantapan Kualitas reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Produktifitas Daerah Guna Mempercepat Penurunan Angka Kemiskinan"** dengan fokus pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik,

Tujuan :

- a. Perbaikan tata kelola pemerintahan dengan prioritas pengembangan sistem penopang (*support system*) berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk penguatan reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan bagi masyarakat;
- b. Peningkatan partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan;
- c. Pengelolaan aset daerah secara profesional.

Sasaran :

- a. Memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan prioritas pengembangan sistem penopang (*support system*) berbasis teknologi informasi dan

komunikasi (TIK) untuk penguatan reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan bagi masyarakat;

- b. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan;
- c. Meningkatkan pengelolaan aset daerah secara profesional.

2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sesuai perspektif hak warga (*rights-based approach*),

Tujuan :

- a. Peningkatkan akses pendidikan dasar universal 12 tahun;
- b. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan akses informasi bursa kerja dan pelatihan;
- c. Peningkatan derajat kesehatan untuk mendukung perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), layanan kesehatan dasar dan pencegahan penyakit menular;
- d. Peningkatan layanan jaminan kesehatan masyarakat;
- e. Peningkatan pengetahuan dan kecukupan pangan yang berkualitas;
- f. Pemenuhan layanan dasar PMKS.

Sasaran :

- a. Meningkatkan akses pendidikan dasar universal 12 tahun;
- b. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan akses informasi bursa kerja dan pelatihan;
- c. Meningkatkan derajat kesehatan untuk mendukung perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), layanan kesehatan dasar dan pencegahan penyakit menular;
- d. Meningkatnya layanan jaminan kesehatan masyarakat;
- e. Meningkatnya pengetahuan dan kecukupan pangan yang berkualitas;
- f. Terpenuhinya layanan dasar PMKS.

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan, pemerataan dan daya saing daerah, melalui:

Tujuan :

- a. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur strategis kabupaten dan jalan poros desa untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan;
- b. Peningkatan akses sanitasi dan air minum layak bagi masyarakat;
- c. Pengurangan areal kawasan kumuh (RTLH) perkotaan dan *spot* kumuh perdesaan;
- d. Pengembangan infrastruktur dan sistem penopang layanan di kecamatan untuk mendukung layanan administrasi dan perijinan terintegrasi.

Sasaran :

- a. Terwujudnya pembangunan dan peningkatan infrastruktur strategis kabupaten dan jalan poros desa untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan;
- b. Meningkatnya akses sanitasi dan air minum layak bagi masyarakat;
- c. Berkurangnya luasan areal kawasan kumuh (RTLH) perkotaan dan *spot* kumuh perdesaan;

- d. Mengembangkan infrastruktur dan sistem penopang layanan di kecamatan untuk mendukung layanan administrasi dan perijinan terintegrasi.

4. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam (SDA) yang berkelanjutan, melalui :

Tujuan :

- a. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
- b. Pengendalian pencemaran perusakan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam;
- c. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan.

Sasaran :

- a. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
- b. Terkendalikannya pencemaran perusakan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam;
- c. Terwujudnya pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan.

5. Meningkatkan pembangunan perdesaan dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran, melalui :

Tujuan :

- a. Pengembangan infrastruktur ekonomi di pusat pertumbuhan kawasan perdesaan (pengembangan pasar desa);
- b. Pengembangan kawasan perdesaan melalui agropolitan, minapolitan, dan agroindustri.

Sasaran :

- a. Terwujudnya pengembangan infrastruktur ekonomi di pusat pertumbuhan kawasan perdesaan (pengembangan pasar desa);
- b. Terwujudnya pengembangan kawasan perdesaan melalui agropolitan, minapolitan, dan agroindustri.

6. Penguatan potensi ekonomi lokal berbasis komoditas dan kawasan didukung dengan pembangunan pertanian dalam arti luas, pariwisata, koperasi dan UMKM, melalui :

Tujuan :

- a. Peningkatan ketahanan pangan melalui percepatan peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dalam arti luas;
- b. Pembangunan dan pengembangan pariwisata terpadu;
- c. Pengembangan pasar kecamatan sebagai penyangga perekonomian kabupaten berbasis kawasan pertumbuhan;
- d. Pembangunan ekonomi lokal melalui Percepatan Pengembangan Koperasi, UMKM / IKM berbasis sentra, klaster, inkubator bisnis, dan OVOP
- e. Peningkatan Investasi dan Ekspor Komoditas Unggulan
- f. Pengendalian Inflasi Daerah

Sasaran :

- a. Meningkatnya ketahanan pangan melalui percepatan peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dalam arti luas;
- b. Terciptanya pembangunan dan pengembangan pariwisata terpadu;
- c. Terwujudnya pengembangan pasar kecamatan sebagai penyangga perekonomian kabupaten berbasis kawasan pertumbuhan;
- d. Terwujudnya pembangunan ekonomi lokal melalui Percepatan Pengembangan Koperasi, UMKM / IKM berbasis sentra, klaster, inkubator bisnis, dan OVOP
- e. Meningkatnya Investasi dan Ekspor Komoditas Unggulan
- f. Terekendalinya Inflasi Daerah

7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim, melalui :

Tujuan :

- a. Pemantapan penataan ruang daerah;
- b. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
- c. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) untuk aktifitas publik dan komunitas;
- d. Perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah-daerah yang rawan bencana;
- e. Peningkatan ketahanan komunitas (*resilient community*) tanggap bencana;

Sasaran :

- a. Terwujudnya penataan ruang daerah yang mantap;
- b. Terwujudnya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
- c. Terwujudnya pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) untuk aktifitas publik dan komunitas;
- d. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah-daerah yang rawan bencana;
- e. Meningkatnya ketahanan komunitas (*resilient community*) tanggap bencana;

8. Penguatan penyelenggaraan trantibum dan linmas untuk menopang proses demokratisasi, melalui :

Tujuan :

- a. Penguatan partisipasi aktif masyarakat dan komunitas dalam kemitraan stabilitas, ketentraman, dan ketertiban;
- b. Pengembangan kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam sistem perlindungan masyarakat;
- c. Peningkatan pelayanan angkutan dan keamanan lalu lintas yang nyaman, manusiawi, dan berperspektif ramah HAM;
- d. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kemitraan sistem kewaspadaan dini.

Sasaran :

- a. Terwujudnya penguatan partisipasi aktif masyarakat dan komunitas dalam kemitraan stabilitas, ketentraman, dan ketertiban;
- b. Terwujudnya kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam sistem perlindungan masyarakat;
- c. Meningkatnya pelayanan angkutan dan keamanan lalu lintas yang nyaman, manusiawi, dan berperspektif ramah HAM;
- d. Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kemitraan sistem kewaspadaan dini yang mantap

Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 di atas semua program prioritas dan kegiatan diarahkan kepada upaya untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan melalui strategi seluruh program dan kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021, yang diwujudkan melalui sinergitas dengan pembagian peran OPD untuk melaksanakan program kegiatan sesuai dengan kewenangan urusan pemerintah daerah, serta dengan memberikan keberpihakan anggaran pada bidang-bidang pembangunan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Selanjutnya perumusan Prioritas, Sasaran, dan Program Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Prioritas, Sasaran, dan Program Pembangunan Kabupaten Wonosobo
Tahun 2017

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	OPD
			2017		
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan				
a	Pendidikan	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	6,22	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		Rata-rata melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas	99,9	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		Angka Partisipasi Murni (APM)	97	Program Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		PAUD, SD, SMP,	77		
		SMA/K	45		
		Angka Putus Sekolah (APS)	72;	Program Pendidikan Non Formal	
		SD, SMP, SMA/K	109,39; 97		
		Angka Melanjutkan (AM)	95		
		dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP ke SMA/K/MA	81		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	OPD
			2017		
		Rasio Guru/Murid	(SD 1:15; SMP 1:14; SMA 1:13)	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
		Akreditasi Sekolah	1		
		Nilai UAS/UAN	(SD = 6,9; SMP = 6,15; SMA - 6,1)	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
b	Kantor Arsip dan Perpustakaan	OSN/FL2N		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kantor Arsip dan Perpustakaan
c	Pelayanan Dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40% penduduk berpendapatan rendah)	Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	75% ; 100%	Program Pendidikan Dasar 9 tahun	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		Rasio APK SMA/MA/SMK antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	55% ; 100%	Program Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
d	Kesehatan	Usia Harapan Hidup	73	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi	99,07%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	OPD
			2017		
		Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	9,3/1.000	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita (persen)	0	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Dinas Kesehatan
		Cakupan kunjungan bayi	99,4%		Dinas Kesehatan
		Prosentase Balita Gizi Buruk	0,78%	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah 2 tahun) (persen)	16,25%		Dinas Kesehatan
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	1	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Persentase Kecamatan yang Mencapai 80 persen Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi	1	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Dinas Kesehatan
		Cakupan Desa/Kelurahan (UCI)	1	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	82/100.000	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	OPD
			2017		
		Cakupan penemuan penderita penyakit TBC BTA	0	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	1		Dinas Kesehatan
		Prevalensi tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	99.6/100.000		Dinas Kesehatan
		Prevalensi HIV (persen)	<0,5% (Target RPJMN)		Dinas Kesehatan
		Prevalensi Tekanan Darah Tinggi (persen)	24,2% (Target RPJMN)		Dinas Kesehatan
		Prevalensi obesitas penduduk usia 18+tahun (persen)	< 15,4%		Dinas Kesehatan
		Persentase merokok penduduk usia < 18 tahun	5,9%		Dinas Kesehatan
		Cakupan komplikasi Kebidanan yang ditangani	1	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	99,9%	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan puskesmas pembantu dan prasarana puskesmas/ puskesmas	Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	OPD
			2017		
		Rasio Posyandu Persatuan Balita	0	pembantu dan jaringannya	Dinas Kesehatan
		Rasio Puskesmas, Poliklinik, puskesmas per satuan penduduk	1:10000	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Dinas Kesehatan
		Rasio rumah sakit per satuan penduduk	1:288,333		Dinas Kesehatan
		Rasio dokter per satuan penduduk	1:5,500	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Dinas Kesehatan
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1:800		Dinas Kesehatan
		Jumlah Kecamatan yang memiliki Minimal 1 Puskesmas Terakreditasi	10	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	OPD
			2017		
		Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	7	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan ana	Dinas Kesehatan
		Kepesertaan Jaminan Kesehatan	1		Dinas Kesehatan
e	Tenaga Kerja	Rasio Penduduk Yang Bekerja	72,18	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Rasio kelulusan S1/S2/S3 Tenaga kerja	300		Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Angka Partisipasi Angkatan Kerja	73,2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase pekerja yang ditempatkan	47,5%		
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0		
		Tingkat / Rasio Ketergantungan	1		
		Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun	2	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi
f	Pemberdayaan Perempuan dan PA	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas	92	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	OPD
			2017		
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	0	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	82/215	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Presentase Jumlah Tenaga Kerja di bawah umur	0,006%	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rasio KDRT	0,5		Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	62,1		Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,5		Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
g	Kesejahteraan Sosial	Rasio PMKS yang tertangani	99,5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	OPD
			2017		
		Rasio lansia yang terfasilitasi	0	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
		Rasio PMKS yang mendapat bantuan sosial	44,13	Program pembinaan anak terlantar	Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
		Rasio lansia yang mendapat bantuan sosial	0	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
				Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
				Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
2	Meningkatkan pembangunan perdesaan dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran, melalui				
a	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	217	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Kantor Pemberdayaan Masyarakat

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	OPD
			2017		
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	45	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
				Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
		Presentase desa tertinggal	38	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
		Presentase desa mandiri	2,39%	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
				Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
3	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik				
a	Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas	Kelembagaan Pemda Tepat Ukuran Sesuai dan Tepat Fungsi serta Sinergis	Terbentuk	Program Penataan Peraturan	Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda
		Rasio penerapan SPP dan SOP pada OPD	10 OPD	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Bagian Komunikasi dan Telematika
		Penerapan SPM pada OPD	15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua Organisasi Perangkat Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	OPD
			2017		
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Semua Organisasi Perangkat Daerah
		Ketepatan waktu penyusunan RKPD	Tepat waktu	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Sinkronisasi program Renja SKPD dan Program RKPD	85		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Sinkronisasi RKA SKPD dengan Renja SKPD	85		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Presentase OPD dengan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B)	25	Program pendidikan kedinasan	Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda
		Rata-rata nilai integritas pelayanan publik OPD	Baik	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda
				Program Peningkatan disiplin aparatur	Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda
		Ralo PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	15000`	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas Pendapatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	OPD
			2017		
		Rasio Realisasi PAD	100		Dinas Pendapatan
		Rasio Serapan Dana Pertimbangan	100	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas Pendapatan
		Presentase pajak Daerah terhadap total pendapatan	2,30		Dinas Pendapatan
		Presentase Retribusi Daerah terhadap total pendapatan	0,90		Dinas Pendapatan
		Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Tepat Waktu		Bagian Keuangan dan Aset Daerah Setda
		Rasio Defisit APBD terhadap Total Pendapatan APBD	-		Bagian Keuangan dan Aset Daerah Setda
		Rasio SILPA tahun sebelumnya terhadap total Belanja APBD	0,09		Bagian Keuangan dan Aset Daerah Setda
		Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	15,00	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Bagian Keuangan dan Aset Daerah Setda
		Rasio Realisasi PAD	100	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Bagian Keuangan dan Aset Daerah Setda
		Rasio Serapan Dana Perimbangan	100		Bagian Keuangan dan Aset Daerah Setda

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	OPD
			2017		
		Presentase pajak Daerah terhadap total pendapatan	2,30		Bagian Keuangan dan Aset Daerah Setda
		Presentase Retribusi Daerah terhadap total pendapatan	0,90		Bagian Keuangan dan Aset Daerah Setda
		Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Tepat waktu		Bagian Keuangan dan Aset Daerah Setda
		Rasio Defisit APBD terhadap Total Pendapatan APBD	-		Bagian Keuangan dan Aset Daerah Setda
		Rasio SILPA tahun sebelumnya terhadap total Belanja APBD	0,09		Bagian Keuangan dan Aset Daerah Setda
		Rasio realisasi Prolegda	15/22	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Bagian Hukum Setda dan Sekretariat Dewan
		Presentase Raperda Yang disetujui DPRD	15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Sekretariat Dewan
		Rasio Perda yang dibatalkan terhadap raperda yang ditetapkan menjadi Perda	-	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah	Sekretariat Dewan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	OPD
			2017		
		Ketepatan Waktu Penyampaian LKPJ	Tepat waktu	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD	Tepat waktu	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Rasio Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	100	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Inspektorat
		Presentase OPD yang Akuntabilitas Kinerjanya Baik (Kategori B)	20	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Inspektorat
4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan				
a	Kesejahteraan sosial dan ekonomi	IPM	73,56	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Bagian Perekonomian Dinas Pertanian dan Perikanan
		PDRB	2486,08	Program pengembangan perikanan tangkap	Bagian Perekonomian Dinas Pertanian dan Perikanan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	OPD
			2017		
		PDRB Per Kapita	3	Program pengembangan industri pengolahan makanan minuman pertanian, perkebunan dan kehutanan	Bagian Perekonomian Kantor Perindustrian dan Perdagangan
		Pertumbuhan Ekonomi	3	Program pengembangan industri pariwisata	Kantor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Program Pendidikan Entrepreneurship	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
b	Berkurangnya Kemiskinan	Presentase penduduk di atas garis kemiskinan	15,40	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Kantor Koperasi UKM
		Tingkat keparahan kemiskinan	1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Kantor Koperasi UKM
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi
c	Perlindungan Sosial bagi Penduduk Rentan dan Kurang Mampu (40% penduduk berpendapatan rendah)	Kepesertaan Jaminan Kesehatan	1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat (miskin)	Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	OPD
			2017		
		Skore Pola Pangan Harapan	95	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
d	Pelayanan Dasar bagi penduduk Rentan dan Kurang Mampu (40% penduduk berpendapatan rendah)	Kepemilikan akte lahir		Program penataan administrasi kependudukan	Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Akses Air Minum	92,32	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan
		Akses Sanitasi Layak	78,58	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan
		Akses Penerangan	100	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan
e	Berkurangnya ketimpangan	Indeks Gini	0,42	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Indeks Williamson Pemerataan versi bank dunia	0,18	Program Pembangunan infrastruktur perdesaan	Dinas Sumberdaya Air dan Bina Marga
		Indeks Ketimpangan Kecamatan	0,18		Dinas Sumberdaya Air dan Bina Marga

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	OPD
			2017		
5	Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan, pemerataan dan daya saing daerah				Dinas Sumberdaya Air dan Bina Marga
a	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Proporsi panjang jalan dalam keadaan baik	69,5%	Program pembangunan jalan dan jembatan	Dinas Sumberdaya Air dan Bina Marga
				Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Dinas Sumberdaya Air dan Bina Marga
				Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Dinas Sumberdaya Air dan Bina Marga
				Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Dinas Sumberdaya Air dan Bina Marga
				Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Dinas Sumberdaya Air dan Bina Marga
				Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Dinas Sumberdaya Air dan Bina Marga
		Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	73,39%	Program pembangunan turap/talud/brojong	Dinas Sumberdaya Air dan Bina Marga

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	OPD
			2017		
				Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Dinas Sumberdaya Air dan Bina Marga
				Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Dinas Sumberdaya Air dan Bina Marga
				Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Dinas Sumberdaya Air dan Bina Marga
				Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Dinas Sumberdaya Air dan Bina Marga
		Presentase penduduk berakses air minum	92,32	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Dinas Sumberdaya Air dan Bina Marga
		Presentase rumah tangga pengguna air bersih	93,43	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Dinas Sumberdaya Air dan Bina Marga
		Presentase rumah tinggal bersanitasi	78,58		Dinas Sumberdaya Air dan Bina Marga
		Presentase Penanganan Sampah	15	Program pengelolaan persampahan	Dinas Sumberdaya Air dan Bina Marga
		Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	0,55		Dinas Sumberdaya Air dan Bina Marga

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	OPD
			2017		
		Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan		Program pengelolaan bangunan gedung	Dinas Sumberdaya Air dan Bina Marga
		Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	44,29	Program pengendalian banjir	Dinas Sumberdaya Air dan Bina Marga
		Ketaatan terhadap RTRW	82	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Dinas Sumberdaya Air dan Bina Marga
		Luas wilayah produktif	85	Program perencanaan tata ruang	Dinas Sumberdaya Air dan Bina Marga
		Luas wilayah banjir	-	Program Pemanfaatan Ruang	Dinas Sumberdaya Air dan Bina Marga
		Luas wilayah kekeringan	34	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Dinas Sumberdaya Air dan Bina Marga
		Presentase tenaga konstruksi bersertifikat		Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Dinas Sumberdaya Air dan Bina Marga
b	Perumahan dan permukiman	Presentase luas permukiman yang tertata	60	Program lingkungan sehat perumahan	Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan
		Presentase kawasan kumuh	0,398	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan
		Rasio permukiman layak huni	0,32		Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	OPD
			2017		
		Kekurangan tempat tinggal (backlog) berdadarkan perspektif menghuni	17.207		Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan
		Rasio rumah layak huni	0,943	Program pengembangan perumahan	Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan
				Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan
		Presentase rumah tangga yang menggunakan listrik (elektrifikasi)	100	Program pemberdayaan komunitas perumahan	Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan
		Rasio ketersediaan daya listrik	N/A	Program pengelolaan areal pemakaman	Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan
		Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	4		Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan
		Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	1.198		Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan
6	Penguatan potensi ekonomi lokal berbasis komoditas dan kawasan didukung dengan pembangunan pertanian dalam arti luas, pariwisata, koperasi dan UMKM, melalui				
a	Ketahanan Pangan	Indeks ketahanan pangan Rata-rata konsumsi pangan per kapita	96	Program peningkatan ketahanan pangan	Bagian PEREKO KP

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	OPD
			2017		
b	Kelautan dan perikanan	Jumlah luasan kolam budi daya	291	Program pengembangan budidaya perikanan	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Jumlah produksi ikan konsumsi	9.939.842	Program pengembangan perikanan tangkap	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Jumlah produksi benih ikan	58.336.567	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Rata-rata konsumsi ikan perkapita	15 kg	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Rasio anggota kelompok tani ikan terhadap jumlah petani ikan/nelayan	0		Dinas Pertanian dan Perikanan
c	Pertanian	Jumlah produksi padi	155.967	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Jumlah produksi jagung	507.691		Dinas Pertanian dan Perikanan
		Jumlah produksi umbi	207.596	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Jumlah produksi sayur	193.197		Dinas Pertanian dan Perikanan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	OPD
			2017		
		Jumlah produksi hortikultura	4.508.017		Dinas Pertanian dan Perikanan
		Jumlah produksi buah-buahan	4.314.820		Dinas Pertanian dan Perikanan
		Jumlah populasi ternak besar	24.535	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Jumlah populasi ternak kecil	323.953	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Jumlah populasi unggas	1.129.509	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Jumlah produksi telur	1.538.681		Dinas Pertanian dan Perikanan
		Jumlah produksi daging	10.833.985		Dinas Pertanian dan Perikanan
		Rasio anggota kelompok tani terhadap petani		Program peningkatan kesejahteraan petani	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Rasio anggota kelompok tani ternak terhadap peternak		Program peningkatan ketahanan program pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Rata-rata konsumsi susu perkapita	7	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Rata-rata konsumsi daging perkapita (protein hewani)	5	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Perikanan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	OPD
			2017		
				lapangan	
		Indeks harga yang dibayar petani	234.751	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Indeks harga yang diterima petani	241.538		Dinas Pertanian dan Perikanan
		Nilai tukar petani	113,3		Dinas Pertanian dan Perikanan
d	Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan manca negara	10.000	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Kantor Pariwisata, Seni dan Ekonomi Kreatif
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	1.000.000	Program pengembangan destinasi pariwisata	Kantor Pariwisata, Seni dan Ekonomi Kreatif
		Kontribusi sektor pariwisata kepada PAD	0	Program pengembangan kemitraan	Kantor Pariwisata, Seni dan Ekonomi Kreatif
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	2,6		
e	Koperasi UMKM	Presentase koperasi aktif Jumlah Anggota Koperasi	1	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
		Presentase simpanan anggota koperasi dalam permodalan			
		Jumlah volume usaha koperasi			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	OPD
			2017		
		Jumlah koperasi dan UMKM yang menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk			
		Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	247	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
		Jumlah BPR/LKM aktif	17		
		Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal			
		Presentase usaha mikro dan kecil terhadap UKM	1	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
		Jumlah tenaga kerja Koperasi dan UMKM	421	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
		Produktivitas UMKM	663		
		Pertambahan jumlah wirausaha baru			
		Kontribusi koperasi dan UMKM dalam investasi			
f	Perdagangan	Rasio ketersediaan dan kebutuhan bahan kebutuhan pokok	100	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Kantor Perindustrian dan Perdagangan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	OPD
			2017		
		Koefisien variasi (rata-rata rasio) harga kebutuhan pokok antara pemerintah dan pasar		Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Kantor Perindustrian dan Perdagangan
		Rasio ketersediaan dan kebutuhan pupuk dan pestisida	100		
		Nilai ekspor bersih perdagangan	552462,95	Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional	Kantor Perindustrian dan Perdagangan
				Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Kantor Perindustrian dan Perdagangan
		Rasio metrologi legal yang ditera / tera ulang	1	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Kantor Perindustrian dan Perdagangan
h	Industri	Penambahan jumlah industri (kecil, menengah, besar)	825,5	Program peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi	Kantor Perindustrian dan Perdagangan
		Penambahan kapasitas produksi industri (kecil, menengah, besar)		Program pengembangan industri kecil dan menengah	Kantor Perindustrian dan Perdagangan
				Program penataan struktur industri	Kantor Perindustrian dan Perdagangan
				Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	OPD
			2017		
i	Penanaman Modal	Jumlah persetujuan investasi	3.000	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
		Jumlah investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	12	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
		Jumlah nilai investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	50000 juta	Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
		Rasio daya serap tenaga kerja	1		
		Rata-rata lama proses perijinan	6		
7	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim				
a	Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Program peningkatan kualitas alam akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	OPD
			2017		
				Program pengendalian kebakaran hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL		Program pengendalian pencermatan dan kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Emisi Gas Rumah Kaca		Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Pengelolaan limbah B-3		Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Program peningkatan pengendalian polusi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Rasio penegakan hukum lingkungan		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	OPD
			2017		
b	Mitigasi Bencana	Indeks Rawan Bencana (IRB)		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Indeks resiko bencana			
		Indeks rawan bencana (IRB)			
8	Penguatan penyelenggaraan trantibum dan limas untuk menopang proses demokratisasi				
a		Indeks Rasa Aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal)	-	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kantor Satpol PP dan Linmas
		Angka kriminalitas yang tertangani	95	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kantor Satpol PP dan Linmas
				Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Kantor Satpol PP dan Linmas

Sebagai indikator pembangunan secara makro, dirumuskan target makro pembangunan tahun 2017 yang dibagi menjadi 10 indikator capaian makro pembangunan daerah. Target tersebut berdasarkan pada target capaian pembangunan yang sudah dilaksanakan dan memperhatikan target capaian yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 sebagai acuan dasar penentuan target tahun 2017. Indikator pembangunan ini untuk mengetahui secara makro kondisi pembangunan daerah yang akan dicapai pada tahun 2017. Berikut target indikator makro pembangunan Kabupaten Wonosobo tahun 2017:

Tabel 4.4
Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

NO	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	TAHUN 2017
1	IPM	73,34
2	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,94
3	Angka Melek Huruf (persen)	100
4	Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,12
5	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah PPP)	662.343
6	Angka Kemiskinan %	18
7	Pertumbuhan Ekonomi %	5-6
8	Laju Inflasi Kabupaten (%)	5
9	Laju pertumbuhan penduduk (%)	0,99
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,05

D. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kewilayahan Kabupaten

Wonosobo

Kabupaten Wonosobo, memiliki posisi yang strategis karena berada di tengah tengahnya wilayah provinsi Jawa Tengah. Namun demikian Kondisi pembangunan kewilayahan saat ini masih terdapat permasalahan utama, yaitu keterisoliran intra dan ekstra wilayah, masih adanya ketimpangan wilayah dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin.

Pengembangan wilayah Kabupaten Wonosobo merupakan upaya untuk memantapkan pertumbuhan pembangunan wilayah yang berkeadilan memperhatikan potensi dengan penciptaan dan penyebaran pusat pusat pertumbuhan yang didukung keadilan infrastruktur wilayah, guna mencapai :

- a. Pembangunan yang merata dan harmonis antar wilayah dengan penyebaran pusat pusat pertumbuhan;
- b. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah menuju percepatan dan pemerataan pertumbuhan;
- c. Pembangunan ekonomi dengan berbasis potensi lokal;
- d. Pembangunan dan pengembangan desa dan kawasan perdesaan

Wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki potensi pengembangan wilayah melalui pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo dapat dilakukan melalui pengembangan Kawasan Perkotaan yang merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) artinya adalah pengembangan kawasan segitiga Selomerto-Wonosobo - Kertek untuk mendorong ekonomi wilayah Kabupaten Wonosobo, yang tentunya perlu didukung pengembangan kawasan koridor jalan kolektor, yang meliputi:

- a. Koridor Sawangan – Wonosobo;
- b. Koridor Wonosobo – Kertek
- c. Koridor Kertek – Kledung dan
- d. Koridor Kertek – Sapuran.

Disamping itu untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi wilayah diperlukan pengembangan sentra-sentra industri kecil di wilayah kabupaten Wonosobo; Pengembangan kawasan agropolitan Rojonoto; Pengembangan kawasan Perbatasan; Pengembangan pariwisata berkelanjutan;